

BAB VIII

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

A. UMUM

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

Jumlah penduduk Propinsi DKI Jakarta mencapai 8,4 juta orang, tinggal di wilayah yang relatif sempit sekitar 650 km², dengan aneka ragam latar belakang sosial ekonomi dan kelompok etnis. Gambaran keadaan penduduk seperti tersebut diatas dapat menjadi potensi pembangunan, sekaligus pula dapat menjadi faktor penghambat pembangunan.

Dengan kondisi tersebut, maka upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk Propinsi DKI Jakarta melalui program KB serta pengarahan mobilitas penduduk masih perlu dilanjutkan dan lebih diintensifkan lagi. Demikian pula dengan pemberdayaan keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera, masih perlu ditingkatkan.

Pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan reproduksi remaja, pelayanan keluarga berencana, penguatan kelembagaan dan jaringan KB, serta administrasi kependudukan. Kegiatan ini akan didukung dengan penyelenggaraan advokasi, konseling dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bagi masyarakat, keluarga pasangan usia subur (PUS) dan remaja yang membutuhkan. Selanjutnya administrasi kependudukan

yang tertib serta kesadaran masyarakat yang memadai tentang pentingnya informasi kependudukan akan mendukung perencanaan yang lebih terarah bagi pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai kekuatan pembangunan bangsa, maka perlu ditingkatkan upaya pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi sumber daya manusia serta upaya meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor yang mendorong perluasan lapangan kerja. Dengan usaha-usaha tersebut diharapkan dapat tercipta manusia-manusia pembangunan yang tangguh, berbudi luhur, terampil, percaya diri dan bersemangat membangun dalam berbagai lapangan kerja produktif.

Permasalahan ketenagakerjaan di Propinsi DKI Jakarta saat ini sampai beberapa tahun kedepan adalah terbatasnya kesempatan kerja, hal ini disebabkan karena penambahan jumlah angkatan kerja baru tidak diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Akibatnya adalah lapangan pekerjaan yang terbatas tersebut harus diperebutkan oleh warga Propinsi DKI Jakarta dengan warga daerah sekitarnya (Botabek).

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan mencakup perluasan kesempatan kerja secara menyeluruh melalui peningkatan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta diarahkan pada kompetensi, kemandirian, peningkatan produktivitas, peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan pekerja dan kebebasan berserikat.

B. ARAH KEBIJAKAN

Masalah kependudukan dan ketenagakerjaan di Propinsi DKI Jakarta merupakan masalah yang kompleks yang harus dihadapi dan diupayakan pemecahannya oleh pemerintah daerah dengan menetapkan arah dan kebijakan yang menjadi pedoman dan arah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Kependudukan

Meningkatkan kualitas penduduk Propinsi DKI Jakarta melalui upaya pengendalian urbanisasi, pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan peningkatan kualitas program KB serta pelayanan kependudukan melalui perbaikan administrasi dan catatan sipil.

2. Ketenagakerjaan

Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta diarahkan pada kompetensi, kemandirian, peningkatan produktivitas, peningkatan upah, penjaminan kesejahteraan, perlindungan pekerja dan kebebasan berserikat.

C. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN

Sebagai tindak lanjut dari arah dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bidang pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan, maka disusun program-program daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun 2002-2007.

1. Kependudukan

1.1. Program Pengendalian Kependudukan

Program ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui upaya penurunan angka kelahiran serta mengurangi jumlah migrasi yang masuk ke Propinsi DKI Jakarta. Program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga guna mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Tujuan lain yang masih terkait dalam program ini adalah meningkatkan kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, terutama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kesehatan.

Sasaran dari program ini adalah: (1) menurunnya jumlah penduduk yang melangsungkan perkawinan pada usia remaja, (2) meningkatnya

pemahaman dan upaya masyarakat, keluarga dan remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja, (3) menurunnya jumlah kehamilan remaja, (4) meningkatnya jumlah peserta KB, (5) menurunnya angka kelahiran total (TFR), (6) meningkatnya persentase pasangan usia subur yang terlayani program KB, (7) meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang ber KB secara mandiri, (8) meningkatnya jumlah, cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang diselenggarakan oleh masyarakat/lembaga kesehatan, dan (9) menurunnya angka migrasi masuk.

Program ini diselenggarakan melalui beberapa kegiatan pokok yaitu Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Reproduksi Remaja dan Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB. Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan pokok Keluarga Berencana adalah: (1) melaksanakan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling KB, (2) menyediakan alat/obat kontrasepsi dan memberikan pelayanan KB yang berkualitas, termasuk kontrasepsi mantap untuk laki-laki dan perempuan bagi keluarga golongan Pra Sejahtera dan Sejahtera I, (3) meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan KB dan bantuan operasional klinik KB, (4) melaksanakan upaya peningkatan partisipasi pria dalam KB, (5) memberikan jaminan dan perlindungan pemakai kontrasepsi yang diprioritaskan pada penanggulangan efek samping secara medis, (6) menyelenggarakan pelayanan pencabutan implant secara cuma-cuma bagi ibu golongan Pra KS dan KS I, (7) melakukan pelatihan, pengkajian dan penelitian operasional pembangunan KB, (8) menyelenggarakan sistem informasi manajemen KB, (9) meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga tentang persiapan dan perawatan kehamilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan ibu, bayi dan anak, dan (10) menyelenggarakan advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kelangsungan hidup ibu, bayi dan balita.

Kegiatan yang dilakukan pada kegiatan pokok kesehatan reproduksi remaja adalah (1) melakukan penyempurnaan dan diseminasi bahan dan metode konseling dan komunikasi, informasi, edukasi kesehatan reproduksi

remaja, (2) melakukan penyuluhan terhadap kesehatan reproduksi bagi remaja, (3) menyelenggarakan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja bagi remaja, keluarga dan masyarakat, (4) memfasilitasi pembentukan institusi pusat konseling kesehatan reproduksi remaja, dan (5) menyelenggarakan pelatihan tenaga inti konseling kesehatan reproduksi remaja.

Kegiatan yang dilakukan pada program penguatan kelembagaan dan jaringan KB adalah: (1) meningkatkan manajemen dan kapasitas kelembagaan program KB tingkat propinsi dan kotamadya/kabupaten administratif, (2) melakukan pelatihan teknis dan bimbingan manajemen bagi penyedia pelayanan KB, (3) menyediakan dukungan manajemen KB di setiap tingkatan administrasi, terutama di kelurahan dan kecamatan, dan (4) menyediakan informasi tentang KB dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

1.2. Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program ini bertujuan untuk menciptakan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang tertib dan akurat sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang baik dan akurat akan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dapat pula disusun statistik vital setiap saat, yaitu jumlah kelahiran, jumlah kematian dan jumlah penduduk yang pindah masuk/keluar.

Sasaran program ini adalah: (1) meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang baik, dan (2) meningkatnya kesadaran penduduk terhadap peraturan yang berkaitan dengan masalah kependudukan dan catatan sipil di Propinsi DKI Jakarta.

Kegiatan pokok yang dilakukan pada program ini adalah : (1) memperbaiki dan menyempurnakan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sudah ada, (2) membentuk dan mengembangkan

database kependudukan di setiap tingkat kelurahan, dan (3) melakukan penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya pelaporan mengenai kelahiran, kematian, perpindahan penduduk.

2. Ketenagakerjaan

2.1. Program Pengembangan Kesempatan Kerja

Program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran melalui peningkatan jam kerja dalam berbagai bidang, dan meningkatkan penerimaan devisa dari pengiriman tenaga kerja keluar negeri.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) tersedianya informasi ketenagakerjaan bagi masyarakat, (2) meningkatnya pemasukan devisa bagi negara, dan (3) menurunnya tingkat pengangguran.

Kegiatan yang akan dilakukan adalah: (1) mewujudkan perluasan lapangan kerja, (2) meningkatkan informasi yang luas mengenai ketenagakerjaan baik di dalam negeri maupun luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara, (3) meningkatnya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, dan (4) terciptanya peluang kerja dan usaha bagi pekerja dan tenaga kerja penyandang cacat.

2.2. Program Perlindungan dan Pengendalian Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) meningkatnya perlindungan, pengawasan dan penegakkan hukum ketenagakerjaan terutama bagi perempuan, (2) berkurangnya kasus pelanggaran ketenagakerjaan, dan (3) meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi oleh program jaminan sosial tenaga kerja.

Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah: (1) mewujudkan perlindungan, pengawasan dan penegakkan hukum khususnya bagi tenaga kerja wanita, (2) menyelesaikan kasus pelanggaran

ketenagakerjaan, dan (3) memberikan penyuluhan tentang jaminan sosial bagi tenaga kerja.

2.3. Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan mendorong, memasyarakatkan dan meningkatkan kegiatan pelatihan kerja dan aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan produktivitas.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (1) meningkatnya upah dan produktivitas tenaga kerja, (2) meningkatnya pelatihan tenaga kerja.

Kegiatan pokok yang akan dicapai adalah: (1) menyesuaikan upah minimum tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja, (2) meningkatkan pelatihan tenaga kerja.